



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Anas Karim No. 14 Pasar Usang Telp/Fax. (0752) 485281 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. WINARNO, SE., ME

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG
PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HENDRI ARNIS

Jabatan : WALI KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 25 Januari 2026

PIHAK KEDUA

WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG



Dr. WINARNO, SE., ME
NIP. 19740206 199903 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Angka	72,03
2	Meningkatnya Layanan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	%	98,00
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	67,56
3	Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender	Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE)	Predikat	Pratama
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Predikat	Nindya
5	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Angka	2,38
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	6,08
6	Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan	%	76,00

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.493.040.094	
2	Program Pemberdayaan Sosial	1.089.099.950	
3	Program Rehabilitasi Sosial	632.842.700	
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	314.594.600	
5	Program Penanganan Bencana	40.600.000	
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	37.147.000	
7	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	228.433.000	
8	Program Perlindungan Perempuan	97.404.700	
9	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	40.000.000	
10	Program Perlindungan Khusus Anak	436.422.000	
11	Program Pengendalian Penduduk	54.789.900	
12	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	284.575.000	
13	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.120.100.000	
	JUMLAH	9.869.048.944	

Padang Panjang, 25 Januari 2026

WALIKOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS

KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
 BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PADANG PANJANG

Dr. WINARNO, SE, ME
 NIP. 197402061999031003



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Anas Karim No. 14 Pasar Usang Telp/Fax. (0752) 485281 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESSY ERIANTI, S.Mn

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. WINARNO, SE., ME

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG
PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 25 Januari 2026

PIHAK KEDUA

**KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG**



Dr. WINARNO, SE., ME
NIP. 19740206 199903 1 003

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL



DESSY ERIANTI, S.Mn
NIP. 19781012 200604 2 007

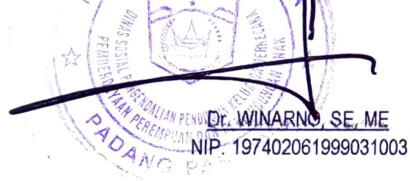
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Layanan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	%	98,00
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	67,56

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
URUSAN SOSIAL	1.431.177.650	
1 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.089.099.950	
1) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.089.099.950	
1 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.089.099.950	
2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	304.930.700	
1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	304.930.700	
1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	304.930.700	
3 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	37.147.000	
1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	37.147.000	
1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	37.147.000	

Padang Panjang, 25 Januari 2026

Pihak Kedua,
 KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
 BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG


 Dr. WINARNO, SE, ME
 NIP. 197402061999031003

Pihak Pertama,
 KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
 DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PADANG PANJANG


 DESSY ERIANTI, S.M
 NIP. 19781012 200604 2 007



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Anas Karim No. 14 Pasar Usang Telp/Fax. (0752) 485281 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAISA, SKM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. WINARNO, SE., ME

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG
PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 25 Januari 2026

PIHAK KEDUA

**KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG**

Dr. WINARNO, SE., ME

NIP. 19740206 199903 1 003

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

RAHMAISA, SKM

NIP. 19741011 199403 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Angka	2,38
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	6,08
2	Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan	%	76,00

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.459.464.900	
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	54.789.900	
	1) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	17.989.900	
	1 Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	17.989.900	
	2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	36.800.000	
	1 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	9.600.000	
	2 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	13.200.000	
	3 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	14.000.000	
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	284.575.000	
	1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	30.000.000	
	1 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	30.000.000	
	2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	156.300.000	
	1 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5.100.000	
	2 Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	151.200.000	
	3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	38.275.000	
	1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	9.900.000	
	2 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	28.375.000	
	4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	60.000.000	
	1 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	60.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.120.100.000	
	1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	856.100.000	
	1 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	849.200.000	

	2	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	6.900.000	
	2)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	264.000.000	
	1	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	60.000.000	
	2	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	204.000.000	

Padang Panjang, 25 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

Dr. WINARNO, SE, ME
NIP. 197402061999031003

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG

RAHMAISA, SKM
NIP. 19741011 199403 2 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Anas Karim No. 14 Pasar Usang Telp/Fax. (0752) 485281 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAFIRMAN THAIB, SP, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. WINARNO, SE., ME

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 25 Januari 2026

PIHAK KEDUA

**KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG**

Dr. WINARNO, SE., ME
NIP. 19740206 199903 1 003

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN
PERLINDUNGAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL**

SYAFIRMAN THAIB, SP, M.Si
NIP. 19690921 199803 1 005

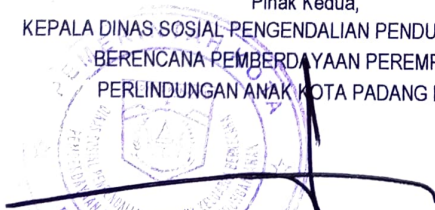
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Layanan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	%	98,00
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	67,56

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
URUSAN SOSIAL	683.106.600	
1 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	632.842.700	
1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	487.044.000	
1 Penyediaan Permakanan	337.840.000	
2 Penyediaan Sandang	99.150.000	
3 Penyediaan Alat Bantu	30.000.000	
4 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	17.407.000	
5 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2.647.000	
2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	145.798.700	
1 Penyediaan Permakanan	28.699.000	
2 Penyediaan Sandang	20.000.000	
3 Penyediaan Alat Bantu	10.000.000	
4 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	87.099.700	
2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	9.663.900	
1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9.663.900	
1 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	9.663.900	
3 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	40.600.000	
1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	34.550.000	
1 Penyediaan Makanan	18.554.000	
2 Penyediaan Sandang	14.571.000	
3 Pelayanan Dukungan Psikososial	1.425.000	
2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	6.050.000	
1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	6.050.000	

Padang Panjang, 25 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG


Dr. WINARNO, SE, ME
NIP. 197402061999031003

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG


SYAFIRMAN THAIB, SR., M.Si
NIP. 19690921 199803 1 005



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Anas Karim No. 14 Pasar Usang Telp/Fax. (0752) 485281 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AZANI MAIZUAR, S. IP, M. I. Kom

Jabatan : SEKRETARIS DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG
PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. WINARNO, SE., ME

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG
PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 25 Januari 2026

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG**

**SEKRETARIS DINAS SOSIAL PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG**

Dr. WINARNO, SE., ME
NIP. 19740206 199903 1 003

AZANI MAIZUAR, S. IP, M. I. Kom
NIP. 19840803 200604 1 004


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIS DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
*1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	%	100
	1 Terselenggaranya layanan administrasi keuangan perangkat daerah.	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100
	2 Terselenggaranya layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100
	3 Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan untuk mendukung pelayanan perkantoran.	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	%	100
	4 Tersedianya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan kondisi baik	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	%	100

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 *1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.493.040.094	
	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.454.856.676	
	2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.297.608	
	3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	542.395.810	
	4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.490.000	

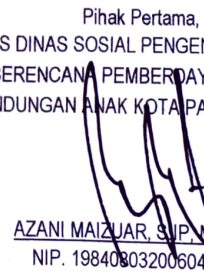
Padang Panjang, 25 Januari 2026

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG



(Signature)
Dr. WINARNO, SE, ME
 NIP. 197402061999031003

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG



(Signature)
AZANI MAIZUAR, S.I.P., M. Kom
 NIP. 198408032006041004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Anas Karim No. 14 Pasar Usang Telp/Fax. (0752) 485281 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAIZIL WARDAH, S.Si, ME

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. WINARNO, SE., ME

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG
PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 25 Januari 2026

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG



Dr. WINARNO, SE., ME
NIP. 19740206 199903 1 003

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

FAIZIL WARDAH, S.Si, ME
NIP. 19741111 200212 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender	Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE)	Predikat	Pratama
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Predikat	Nindya

	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	507.699.700	
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	228.433.000	
	1) Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	17.908.000	
	1) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	17.908.000	
	2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	210.525.000	
	1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	210.525.000	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	38.092.700	
	1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	21.540.000	
	1) Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.540.000	
	2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.552.700	
	1) Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	16.552.700	
3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	40.000.000	
	1) Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	
	1) Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	201.174.000	
	1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	131.536.000	
	1) koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	26.326.000	
	2) Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	105.210.000	
	2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.638.000	
	1) Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.638.000	

Padang Panjang, 25 Januari 2026

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG

FAUZIL
FAUZIL WARDAH, S.Si, ME
NIP.19741111 200212 2 004

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

Dr. Winarno
Dr. WINARNO, SE, ME
NIP. 197402061999031003



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Anas Karim No. 14 Pasar Usang Telp/Fax. (0752) 485281 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEPRI YENTI, SKM

Jabatan : KASUBAG BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AZANI MAIZUAR, S. IP, M. I. Kom

Jabatan : SEKRETARIS DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG
PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

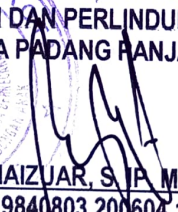
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 25 Januari 2026


PIHAK KEDUA

**SEKRETARIS DINAS SOSIAL PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG**


AZANI MAIZUAR, S. IP, M. I. Kom
NIP. 19840803 200604 1 004

PIHAK PERTAMA

KASUBAG BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



SEPRI YENTI, SKM
NIP. 19810928 200501 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Meningkatnya pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada perangkat daerah	100%
	1) Meningkatnya pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
	(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 orang/bulan
	2) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket
	(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 paket
	(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket
	(4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
	3) Meningkatnya Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%
	(1) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
	(2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
	4) Meningkatnya Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	100%
	(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/ Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 unit
	(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit
	(3) Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi	6 unit


No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.493.040.094	
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.454.856.676	
	(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.454.856.676	
	2) Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.297.608	
	(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	
	(2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.674.250	
	(3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.029.358	
	(4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.594.000	
	3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	542.395.810	
	(1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.995.810	
	(2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.400.000	
	4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.490.000	
	(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas	322.490.000	

(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	
(3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	

Padang Panjang, 15 Januari 2026

Pihak Kedua,

Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang


AZANI MAIZJAR, S.P., M.Kom
NIP. 198408032006041004

Pihak Pertama,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang


SEPRI YENTI, SKM
NIP. 198109282005012004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Anas Karim No. 14 Pasar Usang Telp/Fax. (0752) 485281 Padang Panjang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINDA AMRITA DESSY, S.Tr.Keb
Jabatan : KEPALA UPTD PPA KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. WINARNO, SE., ME
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG
PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 25 Januari 2026

PIHAK KEDUA

**KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG**



Dr. WINARNO, SE., ME
NIP. 19740206 199903 1 003

PIHAK PERTAMA

KEPALA UPTD PPA KOTA PADANG PANJANG

WINDA AMRITA DESSY, S.Tr.Keb
NIP. 19840526 200802 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%
1)	Tesusunnya lembaga/instansi yang terlibat dalam mekanisme rujukan	Jumlah lembaga/instansi yang terlibat dalam mekanisme rujukan	3 lembaga
(1)	Penyediaan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	6 orang
(2)	Penyediaan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	6 orang
(3)	Penyediaan layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	6 orang
(4)	Penyediaan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	6 orang
(5)	Penyediaan layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat	6 orang
(6)	Penyediaan layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	6 orang
(7)	Penyediaan layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	6 orang
2	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	85,84
1)	Terdokumentasinya anak yang mendapatkan layanan dari lembaga AMPK yang difasilitasi	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100%
(1)	Penyediaan layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	45 orang
(2)	Penyediaan layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	45 orang
(3)	Penyediaan layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	45 orang
(4)	Penyediaan layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	45 orang
(5)	Penyediaan layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	45 orang
(6)	Penyediaan Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	45 orang
(7)	Penyediaan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45 orang
(8)	Penyediaan layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	45 orang

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	294.560.000	
1	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	59.312.000	
	1 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	59.312.000	
1	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	3.000.000	
2	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	5.780.000	
3	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	4.500.000	
4	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	18.050.000	
5	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	1.000.000	
6	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	21.982.000	
7	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	235.248.000	
	1 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	235.248.000	
1	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	41.200.000	
2	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	51.000.000	
3	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	3.600.000	
4	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	29.660.000	
5	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	23.400.000	
6	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	73.888.000	
7	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000	
8	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	7.500.000	

Padang Panjang 25 Januari 2026

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

Dr. WINARNO, SE, ME
NIP. 197402061999031003

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

WINDA AMRITA DESSY, S.Tr.Keb
NIP. 19840526 200802 2 001